



PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM MENGEMBANGKAN LITERASI POLITIK

THE USE OF SOCIAL MEDIA IN DEVELOPING POLITICAL LITERATURE

Oleh:

Rayhan Musa Novian

Hilal Ramdhani

Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Pendidikan Indonesia

rayhanovian@upi.edu

<https://doi.org/10.17509/edulib.v10i2.24323>

ABSTRACT

The use of social media is the current primary need of every student, including students in Indonesia and Malaysia. Activities using social media are carried out to get entertainment, existence, and even information about politics. This study focuses on the use of social media in developing political literacy among students in Indonesia and Malaysia. The study used a descriptive quantitative approach, with a survey method, the sample in the study was 100 students, data analysis was carried out with a comparative study to determine the differences and similarities between Indonesian and Malaysian students. Malaysian and Indonesian students as a way to understand the reality of differences in political literacy between the two countries. The purpose of this study seeks to reveal how the use of social media on student political literacy in Indonesia and Malaysia. The results showed that there are similarities between students in Indonesia and Malaysia that social media can develop literacy politics by category awareness in local politics, national and international, rights and obligations as citizens, understand the new term in politics and trust and confidence in making choices at the general election.

Keyword : *Indonesia, Malaysia, Political Literacy, Social Media, Students*

ABSTRAK

Penggunaan media sosial saat ini sudah menjadi kebutuhan primer setiap mahasiswa, termasuk mahasiswa di Indonesia dan Malaysia. Aktivitas penggunaan media sosial dilakukan untuk mendapatkan hiburan, eksistensi, bahkan informasi seputar politik. Penelitian ini fokus pada penggunaan media sosial dalam mengembangkan literasi politik di kalangan mahasiswa di Indonesia dan Malaysia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan metode survei, sampel dalam penelitian sejumlah 100 mahasiswa, analisis data dilakukan dengan studi komparatif untuk mengetahui perbedaan dan persamaan di antara mahasiswa Indonesia dan Malaysia. Tujuan penelitian ini berupaya untuk mengungkap bagaimana penggunaan media sosial terhadap literasi politik mahasiswa di Indonesia dan Malaysia. Mahasiswa Malaysia dan Indonesia sebagai cara untuk memahami realitas perbedaan literasi politik diantara dua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan antara mahasiswa di Indonesia dan Malaysia bahwa media sosial dapat mengembangkan literasi politik dengan kategori kesadaran dalam kegiatan politik lokal, nasional dan internasional, hak dan kewajiban sebagai warga negara, memahami istilah baru dalam politik dan percaya serta yakin dalam menentukan pilihan pada pemilihan umum.

Article Info

Naskah Diterima :
2020-04-29

Naskah Direvisi:
2020-10-12

Naskah Disetujui:
2020-11-26

A. PENDAHULUAN

Media sosial sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat Indonesia dan Malaysia, hampir semua mahasiswa di Indonesia dan Malaysia memiliki akun media sosial, bahkan di antara mereka memiliki lebih dari satu media sosial. Hal tersebut sesuai dengan data *We Are Social (2018)* sebuah perusahaan media asal Inggris, mencatat dalam penelitiannya, dari total populasi Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 130 juta dengan penetrasi 49%. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. [Katadata \(2018\)](#) Menambahkan “hampir separuh dari total pengguna internet di Indonesia merupakan masyarakat dalam kelompok usia 19 – 34 tahun (49,52%), kelompok usia 13 – 18 memiliki persentase sejumlah 16,68%, dan sisanya adalah pengguna dengan kelompok usia 35 tahun ke atas”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum generasi muda di Indonesia menggunakan sosial media.

Pengguna media sosial di Malaysia menunjukkan 25.08 juta pengguna, mewakili 79% penduduk Malaysia. Hasil tersebut merupakan rilis Laporan Digital 2018 yang dikeluarkan [MCMC \(2018\)](#). Malaysia juga berada di urutan ke-5 dunia dari segi penggunaan *e-market* terbanyak, dengan 40% penduduk Malaysia pernah mengadakan transaksi. Media sosial nyatanya tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, akan tetapi sering digunakan sebagai media politik. Hal tersebut terlihat dari gencarnya kampanye-kampanye pada saat menjelang pemilihan umum di media sosial, kritik-kritik terkait kebijakan pemerintah ataupun penyebaran isu-isu yang terkait dengan politik.

Informasi yang dapat diakses dari media sosial terkait politik, tidak hanya seputar isu-isu nasional, bahkan isu-isu daerah dan internasional sering muncul di media sosial.

Banyaknya informasi yang lebih baru dan beragam di media sosial, memunculkan suatu dugaan bahwa media sosial akan menggantikan peran perpustakaan konvensional. Dugaan tersebut juga didasarkan pada semakin gencarnya perpustakaan untuk menyediakan bahan bacaan berbentuk soft file, sehingga untuk membaca sebuah buku tidak mesti datang ke perpustakaan. Realita tersebut menunjukkan suatu keterikatan antara media sosial, literasi politik dan perpustakaan.

[Lailiyah et al \(2018\)](#) Melakukan penelitian yang menunjukkan mayoritas responden menafsirkan literasi politik sebagai upaya untuk membangkitkan orang agar sadar dan berpartisipasi dalam politik (40%), kegiatan terkait politik (28%), pendidikan untuk mengenal dan peduli politik (20%), dan kegiatan yang mendidik dan membuat orang yang melek politik (12%). Jawaban di atas menunjukkan secara umum bahwa pemuda di Indonesia memiliki pengetahuan yang terkait dengan literasi politik. Ini juga menunjukkan bahwa membuat mereka sadar dan kritis terhadap informasi dan situasi politik bukanlah hal yang sulit. Karena kognisi mereka terpapar konsep literasi politik.

Di sisi lain, mayoritas responden menafsirkan politik semata-mata untuk pemerintahan dan kekuasaan (49%), partai politik dan pemilihan umum (10%), serta jabatan dan posisi (6%). Makna tersebut dikaitkan dengan politik sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ambisi, kesibukan, dominasi, dan hal-hal yang cenderung negatif. Hanya 35% responden menganggap politik sebagai strategi dan sarana untuk mewujudkan kepentingan publik.

Pandangan negatif tentang politik kemudian konsisten dengan sikap responden yang sebagian besar dari mereka tidak

setuju untuk mengekspresikan pendapat dan pemikiran politik mereka melalui penggunaan media sosial (69%). Hanya 18% responden setuju dan 1% sangat setuju. 12% responden lain bahkan sangat tidak setuju dengan kegiatan ini. Kita juga dapat melihat bahwa masalah politik jarang muncul dalam timeline media sosial mereka. Sebanyak 57% responden tidak setuju dan 25% sangat tidak setuju bahwa > 30% konten di timeline mereka terkait dengan politik. Hanya 18% responden yang setuju (Lailiyah et al., 2018)

Sebuah survei pemuda yang representatif secara nasional oleh *Common Sense Media* menemukan bahwa media sosial sekarang menjadi sumber berita paling umum untuk kaum muda usia 13-18. Dan pentingnya media sosial bagi politik jauh melampaui perolehan berita. Keterlibatan dengan media sosial sekarang menjadi pusat praktik politik. Media sosial menyediakan sarana utama melalui mana dana dikumpulkan, orang dimobilisasi, tekanan diterapkan pada organisasi dan lembaga negara, dan perspektif dibagikan dan didiskusikan (Bennett, 2012)

Kahne & Bowyer (2019) Menemukan bahwa sebagian besar remaja tidak sering terlibat dalam kegiatan mana pun. Khususnya pada tahun 2013, hanya 39% remaja yang melaporkan terlibat setidaknya dalam satu bentuk OPP (*Online Participatory Politics*) selama 12 bulan sebelumnya. Dan angka itu menurun (mungkin karena 2012 adalah tahun pemilihan presiden) dalam 12 bulan sebelum survei 2015 kami menjadi 35%. Sebelas persen (pada 2013) dan 10% (pada 2015) melaporkan terlibat dalam OPP setidaknya sekali seminggu. Demikian pula, hanya 29% (pada 2013) dan 27% (dalam survei 2015) terlibat dalam setidaknya satu akta TPP (*Targeted Political Pressure*) dengan 12% (pada 2013) dan 10% (pada 2015)

terlibat dalam kegiatan tersebut lebih dari satu kali selama sebelumnya dua belas bulan.

Nilai rata-rata untuk dua ukuran serta perubahan mereka dari waktu ke waktu, dipecah oleh apakah siswa menerima peluang pembelajaran keterlibatan digital setiap tahun. Hasil ini memberikan dukungan awal untuk menunjukkan bahwa siswa yang melaporkan memiliki beberapa peluang pembelajaran keterlibatan digital menampilkan tingkat OPP dan TPP yang lebih baik di tahun 2013 dan 2015 daripada mereka yang tidak memiliki paparan peluang pembelajaran tersebut. Yang lebih penting lagi, siswa dengan beberapa peluang pembelajaran keterlibatan digital, baik yang dinilai pada 2013 atau 2015, menunjukkan peningkatan keterlibatan dalam OPP dan TPP selama dua tahun survei. Sebaliknya, siswa yang tidak memiliki paparan kesempatan belajar keterlibatan digital menunjukkan sedikit atau tidak ada pertumbuhan keterlibatan politik (Kahne & Bowyer, 2019).

Penelitian ini fokus untuk melakukan survei kepada mahasiswa di Indonesia dan Malaysia dengan membahas media yang digunakan untuk mendapatkan informasi, kesadaran dalam kegiatan politik lokal, nasional dan internasional, hak dan kewajiban sebagai warga negara, memahami istilah baru dalam politik dan percaya serta yakin dalam menentukan pilihan pada pemilihan umum. Pemilihan pembahasan tersebut karena erat kaitannya dengan sikap aktif mahasiswa dalam politik sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Makna Literasi Informasi dan Literasi Politik

Ada banyak definisi literasi informasi menurut Lanning (2017) Literasi informasi merupakan kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi

secara efektif, efisien dan secara etis untuk menjawab kebutuhan informasi. Urgensi mempromosikan literasi informasi secara umum merupakan sebuah langkah penting dalam menutup kesenjangan digital melalui penciptaan warga negara yang melek informasi, dan masyarakat sipil yang efektif (Planas Vilà, 2012). Literasi politik berarti keadaan memiliki informasi politik (Krosnick, 1990). Berdasarkan hal itu, dapat diasumsikan bahwa jika seseorang mengetahui nama-nama calon presiden yang mencalonkan diri dalam pemilihan maka ia memiliki kemampuan politik. Definisi ini menekankan literasi politik dalam aspek kognitif. Definisi lain dari literasi politik juga dapat didefinisikan sebagai keadaan individu untuk berkenalan dengan proses politik dan urusan politik sebagai warga negara yang efektif untuk memenuhi peran dan pemahaman mereka tentang masalah ini oleh individu (Denver & Hands, 2013). Substansi ini sangat mirip dengan definisi literasi politik sebelumnya yang difokuskan pada aspek kognitif.

2. Keterkaitan antara Literasi Politik dan Pendidikan Politik

Dalam penjelasan kognitif literasi politik dan variabel politik lainnya yang dapat diukur berdasarkan tingkat (kecanggihan politik dan partisipasi pemilih), para ilmuwan politik berspekulasi bahwa pendidikan dan keterlibatan politik memobilisasi literasi politik sebagai proses internal (Ramdhani & Aliantika, 2019). Teori ini mendominasi bidang saat ini. Dikatakan bahwa pendidikan dan keterlibatan politik bertindak atas dasar individu untuk memobilisasi kemampuan mentalnya menghadapi politik. (Cassel & Lo, 1997)

Converse (1964) mengatakan bahwa elit politik memiliki tingkat kecanggihan yang lebih tinggi daripada massa politik karena efek mobilisasi keterlibatan politik. Dia juga menyimpulkan bahwa efek mobilisasi penga-

laman politik dari waktu ke waktu menjelaskan mengapa kecanggihan politik meningkat seiring bertambahnya usia. (Campbell et al (1960) Percaya bahwa peningkatan tingkat pendidikan dalam masyarakat secara bertahap akan meningkatkan kesadaran ideologis publik, terutama di tingkat bawah di mana kurangnya pendidikan mungkin paling tidak mampu. Mengamati kemudian bahwa kecanggihan tidak meningkat pada tingkat yang lebih rendah, Converse tidak meninggalkan teori tetapi menyimpulkan bahwa efek jangka panjang pendidikan tidak boleh diremehkan.

Dalam studi agen sosialisasi tradisional, istilah literasi politik menggambarkan tujuan pendidikan politik di sekolah. Westholm dalam Denver & Hands (2013) Merujuk pada tujuan kompetensi warga negara, warga negara yang berpengetahuan, dan mempersiapkan warga negara untuk demokrasi, dan mendefinisikan literasi politik sebagai konsep dasar dan fakta yang merupakan syarat yang diperlukan untuk memahami isi debat publik. Denver & Hands (2013, hlm, 263) Mendefinisikan literasi politik sebagai pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik dan isu-isu politik yang memungkinkan orang untuk melakukan peran mereka sebagai warga negara secara efektif.

3. Permasalahan Literasi Politik dan Media Sosial

Permasalahan yang mungkin paling mudah diatasi terhadap pengembangan literasi politik bagi mahasiswa yaitu dengan memahami sumber-sumber informasi politik yang mereka gunakan. Terlalu sering, mereka berpendapat tentang politisi tertentu atau masalah tertentu yang diperoleh secara anekdot, bekas, atau dari sumber yang sangat buruk. Mereka mungkin terlalu mengandalkan hanya pada satu outlet untuk informasi. Misalnya, di kampus yang sangat kon-

servatif, banyak siswa (dan beberapa fakultas) hanya mengandalkan *FOX News* untuk mendapatkan informasi. Ketika membahas media, bias media, dan sumber informasi alternatif, hal itu memberikan latihan di mana mereka harus membaca, mendengarkan, dan menonton berbagai sumber media (setidaknya sepuluh). Mereka kemudian meninjau setiap sumber untuk konten, bias, dan kualitas informasi (Alexander, 2009)

Kekhawatiran tentang literasi politik bukanlah hal yang baru dan telah diungkapkan secara berkala selama lebih dari seabad. Misalnya, selama tahun 1960-an, 1970-an dan 1980-an, penelitian melaporkan tingkat ketertarikan "rendah" tentang masalah politik dan ekonomi kontemporer di kalangan siswa sekolah (Frazer, 1999), dan ada perdebatan tentang apakah sekolah seharusnya mengajar tentang masalah politik dan di Skotlandia kualifikasi sekunder yang mengandung unsur-unsur subjek seperti itu, muncul selama 1960-an dan 1970-an (Bocchel, 2009).

Beberapa tahun terakhir telah muncul kekhawatiran baru tentang literasi politik, dalam hubungannya dengan debat yang lebih luas tentang kewarganegaraan, dan ini dapat ditelusuri kembali ke sejumlah faktor termasuk:

- a) Keprihatinan atas penurunan yang dirasakan dalam tingkat keterlibatan politik dan partisipasi politik di antara kaum muda, terutama yang diukur dengan jumlah pemilih dalam pemilihan;
- b) Ide-ide modal sosial dan modal manusia telah mendorong beberapa orang untuk mempertimbangkan cara-cara di mana pengembangan individu dan kontribusi kepada masyarakat dapat ditingkatkan;

- c) Kepedulian terhadap tingkat keakraban para imigran dengan cara hidup orang lokal;
- d) Pergeseran menuju gaya demokrasi yang lebih partisipatif.

Salah satu contohnya adalah Pirie & Worcester (1998), yang mencatat bahwa apa yang mereka sebut 'Generasi Millennial' memiliki sedikit minat dalam politik (khususnya politik partai), atau keyakinan bahwa memilih dalam pemilihan akan membuat perbedaan, dan harapan yang rendah dari pemerintah, meskipun mereka menemukan bahwa banyak yang rela mengambil tindakan terhadap masalah yang memprihatinkan mereka, sehingga dapat munculnya generasi apolitis.

Menanggulangi rendahnya pemahaman tentang 'politik dasar' pada tingkat pertama di kalangan mahasiswa perlu dipertimbangkan oleh para dosen dan penelitian yang kemungkinan perlunya kewarganegaraan untuk diajarkan sebagai landasan untuk memahami kebijakan sosial. Keterampilan membaca yang buruk dan kebiasaan mengumpulkan berita mempertanyakan tingkat kecerdasan. Bagi mereka yang mencoba membawa bentuk-bentuk penilaian baru (misalnya pekerjaan portofolio berdasarkan debat akademik), kurangnya kemampuan dan keterampilan dalam menyatukan berbagai bentuk opini dan berita terbukti bermasalah. Mengatasi defisit keterampilan di tingkat universitas dengan demikian penting. Mengatasi masalah kepentingan politik dapat diatasi dengan mengadopsi pendekatan berbeda pada pengajaran kebijakan sosial dan ilmu sosial. Memberikan kursus intensif mungkin memudahkan transisi ke pembelajaran kebijakan sosial. Mengajar dari perspektif yang diterbitkan, lebih langsung mungkin lebih menarik perhatian siswa (Heron & McManus, 2003).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan melakukan survey terbatas pada mahasiswa di Malaysia dan di Indonesia. Jumlah sampel dalam penelitian yaitu 50 mahasiswa di Indonesia dan 50 mahasiswa di Malaysia, data yang diperoleh kemudian ditampilkan dalam skala likert yaitu dengan opsi pilihan sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian di komparasikan untuk menemukan persamaan dan perbedaan penggunaan media sosial terhadap pengembangan literasi politik di Indonesia dan Malaysia, studi komparatif tersebut menggunakan analisis yang didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai realita penggunaan media sosial terhadap pengembangan literasi politik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

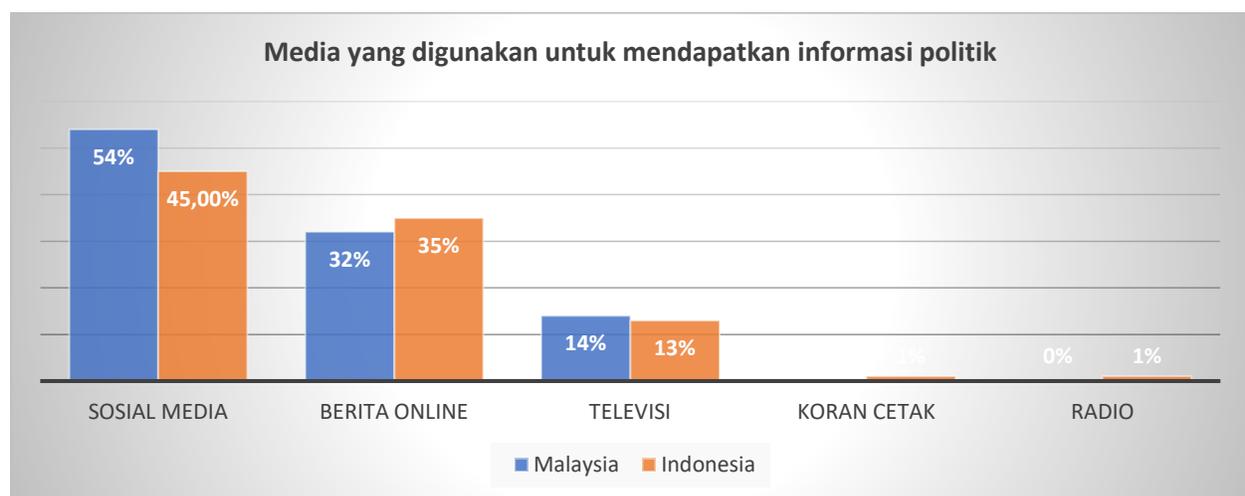
Data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada aspek media yang digunakan untuk mendapatkan informasi, kesadaran dalam kegiatan politik lokal, nasional dan internasional, hak dan kewajiban sebagai warga negara, memahami istilah baru dalam politik dan percaya serta ya-

kin dalam menentukan pilihan pada pemilihan umum menunjukkan hasil yang beragam walaupun memiliki banyak kesamaan terkait penggunaan media dan pengembangan literasi politik mahasiswa.

1. Media yang Digunakan untuk Mendapatkan Informasi

Dalam kehidupan demokrasi yang sudah memasuki era teknologi, perkembangan media menjadi sangat pesat, kondisi tersebut mengakibatkan akses informasi warga negara dalam politik menjadi sangat masif (Bennett, 2012). Sehingga media menjadi aspek penting dalam membangun demokrasi, bahwa dalam ilmu politik, kebebasan media merupakan salah satu indikator negara yang mengedepankan demokrasi.

Berdasarkan data *We Are Social* (2018) di Indonesia dan Laporan MCMC (2018) di Malaysia menunjukkan pengguna internet di kedua negara tersebut sangat banyak, bahkan jumlahnya pun melebihi setengah dari jumlah penduduk di kedua negara tersebut. Hal itu, mendorong kami untuk melakukan penelitian media mana yang sering digunakan oleh mahasiswa untuk mendapatkan informasi terkait dengan literasi politik.



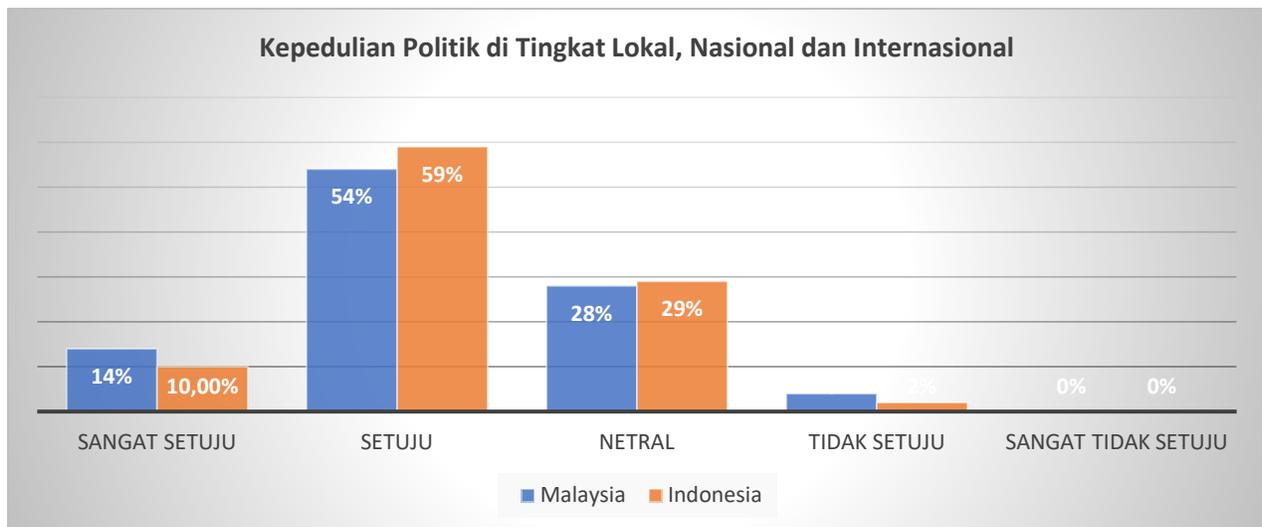
Gambar 1

Hasil Penelitian Media yang Digunakan untuk Mendapatkan Informasi

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman terkait media yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait literasi politik, walaupun jumlah untuk koran cetak dan radio hanya 1%. Sedangkan, penggunaan media oleh mahasiswa di Malaysia terfokus pada sosial media, berita online dan televisi, bahkan 54% dari mahasiswa menggunakan sosial media untuk mendapatkan informasi terkait politik.

2. Kepedulian pada Politik Lokal, Nasional dan Internasional

Literasi politik erat kaitannya dengan kepedulian dan keterlibatan warga negara dalam politik lokal, nasional dan internasional (Davies et al., 2013). Warga negara yang sudah mapan secara literasi politik akan memiliki sikap peduli terhadap keadaan politik dilingkungannya (Brooks & Normore, 2010), seperti memberi masukan, opini bahkan kritik terhadap pemerintahan. Kondisi tersebut juga menandakan bahwa adanya pelibatan dari warga negara secara langsung dalam kegiatan politik, karena idealnya pengembangan demokrasi selaras dengan peningkatan literasi politik warga negaranya (Westheimer & Kahne, 2009).



Gambar2

Hasil Penelitian Penggunaan Media terhadap Kepedulian pada Politik Lokal, Nasional dan Internasional

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan secara signifikan antara mahasiswa di Indonesia dan mahasiswa di Malaysia terkait penggunaan media terhadap kepedulian pada politik lokal, nasional dan internasional. Nampak terlihat bahwa mayoritas responden menyatakan

setuju bahwa media yang digunakan untuk memperoleh literasi politik dapat mengembangkan kepedulian politik di lingkungannya.

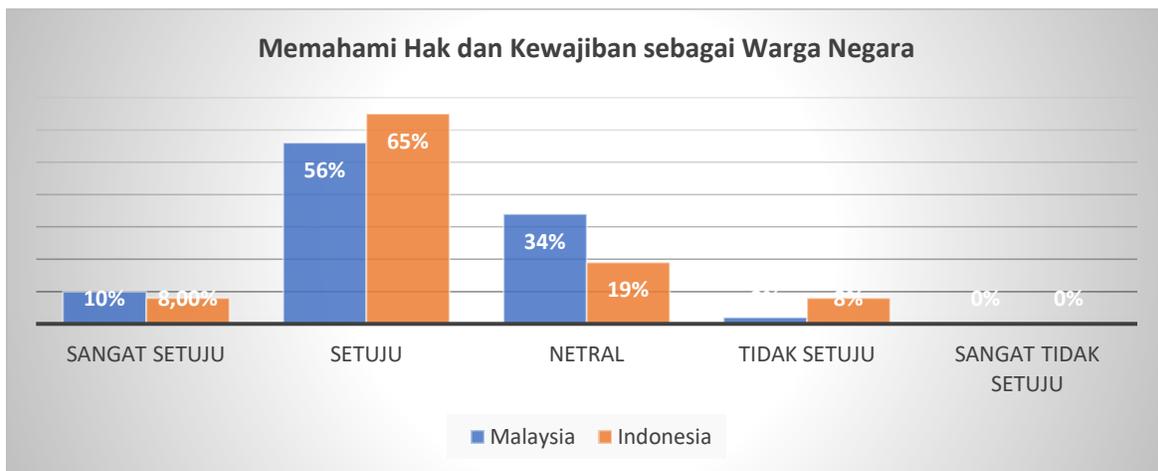
Hasil tersebut juga bahwa kebebasan informasi dan penggunaan media untuk memperoleh literasi politik dalam mengembangkan kepedulian pada politik di

tingkat lokal, nasional dan internasional (Guillén & Suárez, 2005). Hal tersebut erat kaitannya dengan kognitif seseorang, karena tanpa didukung oleh kemampuan yang baik tentu akan sulit untuk memahami literasi politik di media sosial.

3. Memahami Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara

Pada era digitalisasi yang semakin berkembang di seluruh dunia menunjukkan

adanya penguatan akan hak dan kewajiban warga negara (Mandarano et al., 2010). Kedua aspek ini nampaknya memiliki fokus yang berbeda, yaitu warga negara biasanya menuntut hak, sedangkan negara menuntut kepatuhan warga negara akan kewajibannya. Kedua hal tersebut merupakan aspek yang saling terkait dalam proses berbangsa dan bernegara.



Gambar 3.

Hasil Penelitian Memahami Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat memantu mahasiswa di Indonesia dan Malaysia untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hasil penelitian ini dapat di aplikasi dalam beberapa kegiatan bernegara, seperti pemilihan umum, di mana hal itu merupakan hak bagi setiap warga negara untuk memilih calon pemimpin (Rini, 2016; Simamora, 2013). Selain itu, mahasiswa dapat memahami kewajiban sebagai warga negara, seperti patuh pada hukum positif yang berlaku di suatu negara (Belladonna & Anggraena, 2019; Susanti, 2013). Hak dan kewajiban yang di miliki oleh mahasiswa juga dapat menjadi *counter radicalism* yang dapat membahayakan generasi ban-

gsa di masa depan (Ramdhani & Aliantika, 2019)

Mahasiswa di Malaysia menunjukkan bahwa mayoritas mereka menyatakan setuju bahwa media sosial dapat pengembangan pengetahuan mereka untuk memashami hak dan kewajiban sebagai warga negara, begitu pula dengan mahasiswa di Indonesia yang menyatakan bahwa mereka setuju penggunaan media sosial dapat membantu untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Menariknya dalam pertanyaan kuesioner ini, tidak ada satu pun responden yang memilih opsi sangat tidak setuju, hal itu menandakan bahwa penggunaan media so-

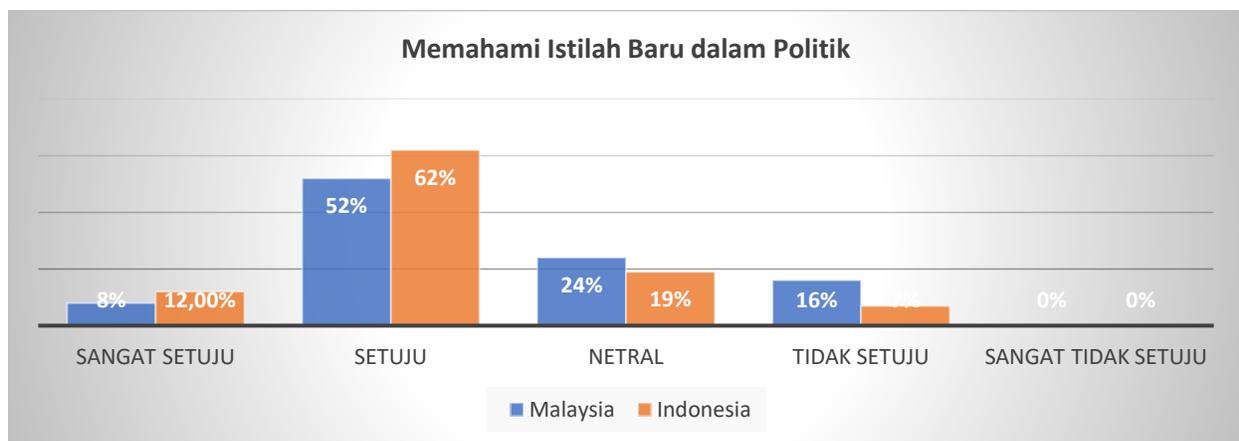
sial ternyata efektif untuk memahami hak dan kewajiban warga negara.

4. Memahami Istilah Baru Politik

Dalam kehidupan saat ini, perkembangan teknologi informasi mengakibatkan akses informasi kepada warga negara dalam politik menjadi sangat masif dan luas, menyebabkan seseorang dapat mengetahui hal-hal baru yang sebelumnya asing, untuk memahami istilah baru dalam politik bagi kalangan pemuda, mereka dapat mengakses melalui media untuk mencari informasi

mengenai politik. Informasi politik dapat diinterpretasikan sebagai “pengetahuan politik”, “literasi kewarganegaraan” dan “kompetensi

warganegara” untuk memahami konteks informasi politik dapat diartikan sebagai pengetahuan baru tentang bagaimana sistem politik bekerja, pengetahuan tentang situasi politik saat ini dan politik sehari-hari, atau pengetahuan mengenai aktor politik dan perbedaan ideologisnya (Smith & McMenemy, 2017)



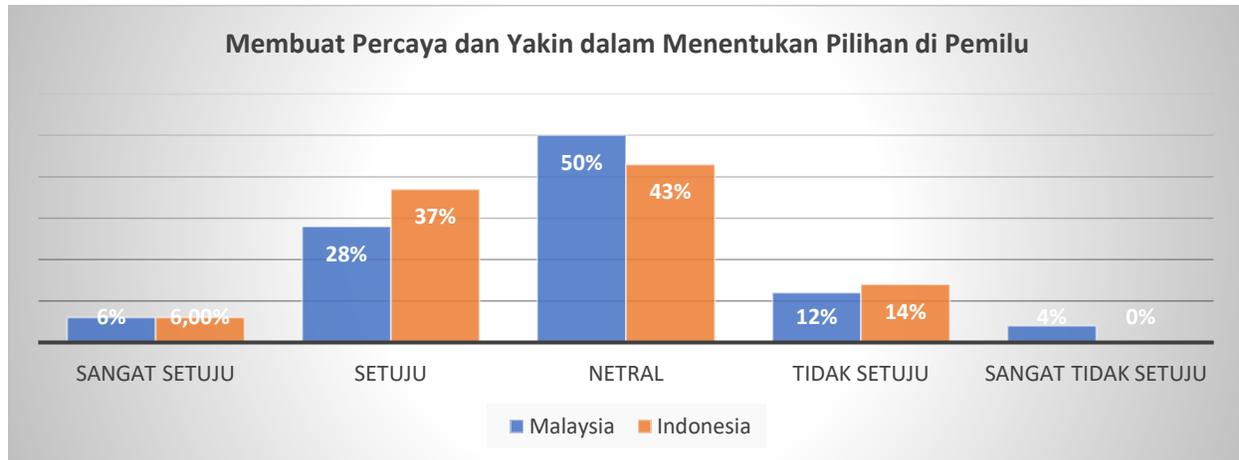
Gambar 4.

Hasil Penelitian Memahami Istilah Baru dalam Politik

Dari data di atas dapat bahwa responden dari Indonesia dan Malaysia tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam mengenal istilah baru politik yang berasal dari media. Dari hasil di atas menunjukkan adanya pengetahuan baru dalam istilah politik pada responden dengan hasil setuju sejumlah 52% untuk Malaysia serta 62% untuk Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dengan mengetahui situasi terkini melalui media, mayoritas responden menunjukkan adanya pemahaman pengetahuan baru dalam politik.

Agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses politik, termasuk pemilihan umum, warga negara harus mampu mengembangkan perspektif yang kaya akan informasi dan membuat penilaian yang konsisten dalam pandangan mereka, berdasarkan informasi yang mereka jumpai dari berbagai macam sumber. Namun, sedikit yang diketahui tentang bagaimana kaum muda terpapar untuk memahami dan menggunakan informasi politik dalam konteks interaksi mereka yang beragam dengan kehidupan politik (Smith, 2017).

5. Membuat Percaya dan Yakin dalam Menentukan Pilihan di Pemilu



Gambar 5.

Hasil Penelitian Membuat Percaya dan Yakin dalam Menentukan Pilihan di Pemilu

Berdasarkan data di atas, menunjukkan responden asal Indonesia dan Malaysia tidak memiliki perbedaan jawaban yang signifikan, mayoritas menyatakan netral 50% untuk Malaysia dan 43% dari Indonesia, dalam membuat keputusan untuk berpartisipasi dalam pemilu. [Gil de Zúñiga \(2012\)](#) Mengungkapkan bahwa dengan pencarian informasi melalui media online merupakan hal positif dalam partisipasi politik, dengan mendapatkan informasi politik tersebut seseorang akan dapat menentukan bagaimana memilih dan dimungkinkan ketika seseorang telah memiliki pengetahuan dasar dan minat dalam politik. ([Gil de Zúñiga & Diehl, 2019](#)) Kemudian menurut [Delli Carpini & Keeter dalam Converse \(1964\)](#) Mereka mengungkapkan, bahwa orang yang lebih berpengetahuan tentang politik cenderung untuk menentukan kandidat dan berpartisipasi dalam pemilihan

E. KESIMPULAN

Studi ini telah mengidentifikasi bagaimana literasi politik dikalangan mahasiswa

dari dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia dalam upaya mereka untuk mendapatkan informasi mengenai politik. Hasil studi ini mengungkapkan sosial media merupakan media yang sering digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses berita atau informasi mengenai politik. Sosial media inilah yang menjadi sumber mereka dalam mendapatkan informasi politik terkini, kemudian bagaimana kecenderungan mereka terhadap informasi politik terkini yang membuat mereka melek informasi dan sadar akan memiliki rasa tanggung jawab serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hasil ini juga mengungkapkan adanya pengetahuan baru saat mereka mengakses informasi politik. Dengan pengetahuan yang cukup pada mereka, mengindikasikan mereka turut aktif dalam partisipasi politik, ini merupakan kondisi positif yang berimplikasi terhadap pemilihan umum, dikarenakan mereka dapat mengetahui kondisi politik terkini sampai kandidat politik dalam pemilihan umum yang akan datang atau berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, R. C. (2009). Political Literacy as Information Literacy. *Communication in Information Literacy*, 3(1).
<https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1151&context=comminfolit>
- Belladonna, A. P., & Anggraena, S. N. (2019). Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 196. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1442>
- Bennett, W. L. (2012). The Personalization of Politics: Political Identity, Social Media, and Changing Patterns of Participation. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 644(1), 20–39. <https://doi.org/10.1177/0002716212451428>
- Katadata. (2018). *Berapa Pengguna Media Sosial Indonesia? | Databoks*. (n.d.). Retrieved October 15, 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia>
- Bochel, H. (2009). Political Literacy. In G. McManus, Mike; Taylor (Ed.), *Active Learning and Active Citizenship: Theoretical Contexts* (p. 150). University of Birmingham. <https://core.ac.uk/download/pdf/53698.pdf#page=150>
- Brooks, J. S., & Normore, A. H. (2010). Educational leadership and globalization: Literacy for a global perspective. *Educational Policy*, 24(1), 52–82. <https://doi.org/10.1177/0895904809354070>
- Campbell, Angus; Converse, Phillip E; Miller, Warren E; Stokes, D. E. (1960). *The American Voter*. Wiley.
- Cassel, C. A., & Lo, C. C. (1997). Theories of political literacy. *Political Behavior*, 19(4), 317–335. <https://doi.org/10.1023/A:1024895721905>
- Converse, P. E. (1964). *The nature of belief systems in mass publics*. Free Press.
- Davies, I., Mizuyama, M., Ikeno, N., Parmenter, L., & Mori, C. (2013). Political literacy in Japan and England. *Citizenship, Social and Economics Education*, 12(3), 163–173. <https://doi.org/10.2304/csee.2013.12.3.163>
- Denver, D., & Hands, G. (2013). *Notes and Comments Knowledge , Attitudes and Perceptions of School Students*. 20(2), 263–279.
- Digital in 2018: World's internet users pass the 4 billion mark - We Are Social*. (n.d.). Retrieved October 15, 2020, from <https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018>
- Frazer, E. (1999). Introduction: The idea of political education. *Oxford Review of Education*, 25(1–2), 37–41. <https://doi.org/10.1080/030549899104099>
- Gil de Zúñiga, H. (2012). Social Media Use for News and Individuals' Social Capital, Civic Engagement and Political Participation. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 17(3), 319–336. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2012.01574.x>
- Gil de Zúñiga, H., & Diehl, T. (2019). News finds me perception and democracy: Effects on political knowledge, political interest, and voting. *New Media and Society*, 21(6), 1253–1271. <https://doi.org/10.1177/1461444818817548>
- Guillén, M. F., & Suárez, S. L. (2005). Explaining the global digital divide: Economic, political and sociological drivers of cross-national internet use. *Social Forces*, 84(2), 681–708.

- <https://doi.org/10.1353/sof.2006.0015>
- Heron, E., & McManus, M. (2003). Political Literacy and the Teaching of Social Policy. A Study into the Political Awareness and Political Vocabularies of First Year Undergraduates. *Social Policy and Society*, 2(1), 23–32. <https://doi.org/10.1017/s1474746403001040>
- Kahne, J., & Bowyer, B. (2019). Can media literacy education increase digital engagement in politics? *Learning, Media and Technology*, 44(2), 211–224. <https://doi.org/10.1080/17439884.2019.1601108>
- Krosnick, J. A. (1990). Expertise and Political Psychology. *Social Cognition*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.1521/soco.1990.8.1.1>
- Lailiyah, N., Yuliyanto, M., & Pradhana, G. A. (2018). Youthizen, Political Literacy, and Social Media. *E3S Web of Conferences*, 73, 20–23. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187314005>
- Lanning, S. (2017). *Concise Guide to Information Literacy* (2nd ed.). Unlimited Libraries.
- Mandarano, L., Meenar, M., & Steins, C. (2010). Building social capital in the digital age of civic engagement. *Journal of Planning Literature*, 25(2), 123–135. <https://doi.org/10.1177/0885412210394102>
- MCMC. (2018). Internet users survey 2018: Statistical brief number twenty-three. *Internet Users Survey 2018*, 1–39. <https://www.mcmc.gov.my/skmmgovmy/media/General/pdf/Internet-Users-Survey-2018.pdf>
- Pirie, M., & Worcester, R. M. (1998). *The Millennial Generation*. <https://pdfs.semanticscholar.org/fdc0/e7db42f596cf2c7b587c68af24c2613154db.pdf>
- Planas Vilà, M. (2012). The Prague declaration. *Nutricion Hospitalaria*, 24(5), 622–623. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19893875>
- Ramdhani, H dan Aliantika, N. N. (2019). *Aktualisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya deradikalisasi mahasiswa*. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP, 2(1), 357–362.
- Rini, W. silvi D. (2016). Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015). *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 87–104. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2578>
- Simamora, J. (2013). The Protection of Citizen's Constitutional Right to Vote. *Jurnal Yudisial*, 6(2), 123–142.
- Smith, L. N., & McMenemy, D. (2017). Young people's conceptions of political information: Insights into information experiences and implications for intervention. *Journal of Documentation*, 73(5), 877–902. <https://doi.org/10.1108/JD-03-2017-0041>
- Susanti, R. (2013). Penerapan Pendidikan Karakter Di Kalangan Mahasiswa. *Al-Ta Lim Journal*, 20(3), 480–487. <https://doi.org/10.15548/jt.v20i3.46>
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2009). Educating the Political Goals Citizen: Pedagogical by. *Political Science*, 37(2), 241–247.